



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WALUYO HANDOKO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR IV BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUMAS
3. NHK : 867397

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m<sup>2</sup>/280 m<sup>2</sup> di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 1008 m<sup>2</sup> di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 448 m<sup>2</sup> di BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 337.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY HB 1.5 L RSCVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 156.258.108

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.103.258.108

**III. HUTANG** Rp. 134.180.494

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.969.077.614

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.